

EFEKTIVITAS PERAN *UNITED NATIONS INTERM FORCE IN* *LEBANON* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL- HIZBULLAH PADA TAHUN 2023

Bayu Widyoseno¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRAK

Konflik yang terjadi di Lebanon pada tahun 2006 menimbulkan korban sipil dan militer serta hancurnya infrastruktur sipil dan pengungsian besar-besaran akibat serangan Israel terhadap negara-negara di Timur Tengah. PBB membentuk operasi penjaga perdamaian yaitu United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) dengan tujuan menjaga perdamaian di Lebanon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi dokumenter. Studi dokumenter dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen tertulis atau gambar. Penelitian ini menggunakan Perspektif Neorealis dan teori Konsep keberhasilan Operasi Perdamaian. Teori ini menjelaskan apakah mandat terpenuhi, apakah operasi tersebut mengarah pada penyelesaian sengketa, apakah kehadiran operasi berkontribusi terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini membuat Indonesia berinisiatif untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon dalam situasi saat ini. Hasil penelitian, menjelaskan bahwa efektivitas UNIFIL dalam menyelesaikan konflik Israel-Hizbullah masih perlu mengembangkan strategi karena konflik Israel-Hizbullah sampai akhir tahun 2023 pun masih sangat memanas. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan teknik analisis yaitu reduksi data. Data yang dikumpulkan bersumber dari sumber literature terpercaya, wawancara dan observasi yang dimana dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi.

Kata Kunci : Hizbullah, Lebanon, Israel, UNFIL

ABSTRACT

The conflict that occurred in Lebanon in 2006 caused civilian and military casualties as well as the destruction of civilian infrastructure and massive displacement due to Israeli attacks on countries in the Middle East. The United Nations established a peacekeeping operation, the United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL), with the aim of maintaining peace in Lebanon. This research uses qualitative methods with data collection methods in the form of documentary studies. Documentary studies are conducted by collecting and analyzing written or pictorial documents. This research uses a Neorealist Perspective and the theory of the Concept of Peace Operation success. This theory explains whether the mandate is fulfilled, whether the operation leads to dispute resolution, whether the presence of the operation contributes to the maintenance of international peace and security. This made Indonesia take the initiative to send peacekeeping troops to Lebanon in the current situation. The results of the study explain that the effectiveness of UNIFIL in resolving the Israel-Hezbollah conflict still needs to develop a strategy because the Israel-Hezbollah conflict until the end of 2023 is still very heated. Researchers use qualitative methods that are descriptive-analytical in nature with analysis techniques, namely data reduction. The data collected comes from reliable literature sources, interviews and observations which can describe the events that occur.

Keywords: Hezbollah, Lebanon, Israel, UNFIL

PENDAHULUAN

Dalam hubungan internasional, konflik selalu menjadi topik utama yang terkait erat dengan dinamika perang dan damai. Kompleksitas hubungan antar aktor, baik negara maupun non-negara, membuat stabilitas keamanan dan politik sulit didefinisikan dalam kasus tertentu. Perbedaan kepentingan sering memicu konflik, yang membawa perhatian pada resolusi konflik. Sebagai bidang studi, resolusi konflik berfokus pada mengubah masyarakat dari keadaan perang atau kekerasan menuju perdamaian negatif (tanpa kekerasan) dan dari perdamaian negatif menuju perdamaian positif (tanpa kekerasan dan ketidakadilan sosial). (Sousa, 2018) Analisis konflik dan pemecahan masalah dalam penyelesaian sengketa melibatkan dua pendekatan utama: transisi dari perang ke perdamaian negatif yang fokus pada penghentian kekerasan, dan transformasi konflik yang bertujuan mengatasi penyebab konflik secara mendalam serta mempromosikan perdamaian positif dan pencegahan konflik tanpa kekerasan.

Konflik dapat bersifat internal, yakni perselisihan antar kelompok atau dengan pemerintah dalam suatu negara, atau eksternal, yakni perselisihan melampaui batas teritorial negara seperti konflik Lebanon-Israel. Konflik Lebanon-Israel memiliki sejarah panjang dengan puncak ketegangan pada tahun 2006 ketika Hizbullah dan Israel terlibat dalam perang. Israel berusaha keras melawan Hizbullah dengan cara agresif, sementara Hizbullah dapat mempertahankan diri meski secara teknis kalah. Perang tersebut menyebabkan banyak korban sipil, terutama di Lebanon, dan memicu tuntutan internasional untuk gencatan senjata serta peningkatan keterlibatan pasukan penjaga perdamaian PBB melalui The United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). UNIFIL menghadapi tantangan berat dalam menstabilkan situasi dan mengurangi risiko eskalasi lebih lanjut, dengan perubahan terbaru pada mandatnya diharapkan dapat membantu menekan ketegangan dan memaksa Hizbullah untuk bertanggung jawab.

Hingga pada bulan Agustus, Dewan Keamanan PBB memilih untuk memperbarui mandat UNIFIL, dan Hizbullah melancarkan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL. Segera setelah itu, pada 24 Agustus, IDF menyerang pangkalan yang dikuasai Iran di Suriah dan meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke Beirut. Hizbullah menanggapi dengan menembakkan rudal anti-tank ke jip dan pangkalan militer

IDF dengan Israel menanggapi dengan menembakkan kembali sekitar 100 peluru artileri dan amunisi lainnya ke sasaran Hizbullah. (Jinsa, 2021) Permasalahan yang muncul ini kemudian semakin menjadi pelik dan mendapatkan atensi dan tekanan masyarakat internasional akibat banyaknya korban sipil yang menjadi dampak dari perselisihan ini.

Seiring waktu, peran UNIFIL sebagai pihak ketiga menjadi semakin penting dalam mengelola ketidakstabilan politik dan keamanan antara Lebanon dan Israel. Didirikan pada Maret 1978 oleh Dewan Keamanan PBB, UNIFIL awalnya bertujuan untuk mengonfirmasi penarikan Israel dari Lebanon, memulihkan perdamaian, dan membantu pemerintah Lebanon. Mandat UNIFIL telah disesuaikan dua kali pada tahun 1982 dan 2000 untuk menanggapi perubahan dinamika konflik. (UN, 2021) Setelah krisis Juli/Agustus 2006, Dewan Keamanan PBB memperluas mandat UNIFIL untuk mencakup pemantauan penghentian permusuhan, mendukung angkatan bersenjata Lebanon di selatan Lebanon, serta memperluas bantuan kemanusiaan dan pemulangan pengungsi secara aman. Penyesuaian ini dirancang untuk menanggapi perkembangan konflik dan dampaknya. Keterlibatan PBB melalui UNIFIL menunjukkan adanya relevansi bahwa dalam situasional konflik, dibutuhkan adanya upaya dalam mengelola konflik dengan strategi tertentu.

Untuk mengelola konflik Lebanon-Israel, integrasi kerjasama internasional, terutama melalui operasi perdamaian seperti UNIFIL, sangat penting. UNIFIL melibatkan berbagai negara dalam operasinya untuk meredam ketegangan yang meningkat, terutama dengan kehadiran Hizbullah sebagai kelompok bersenjata. Dalam menghadapi potensi konflik lebih lanjut, di mana Hizbullah mungkin meningkatkan serangannya, Israel harus siap untuk serangan pendahuluan. PBB telah membuat kemajuan dengan memperbarui mandat UNIFIL, termasuk mendorong Lebanon untuk memberikan akses penuh kepada UNIFIL untuk melaporkan transfer senjata ke teroris. Resolusi terbaru juga meminta penilaian kinerja UNIFIL oleh Sekretaris Jenderal PBB dan laporan berkala tentang pelanggaran dan kebebasan Bergeraknya di Lebanon. (Jinsa, 2021)

Mandat baru UNIFIL menambahkan persyaratan untuk membenarkan anggaran, ukuran kekuatan, dan kemampuan misinya. Hizbullah tetap menjadi kekuatan kuat di Lebanon, dan pemerintah serta militer Lebanon seringkali menggagalkan mandat

UNIFIL. Penelitian mengenai UNIFIL tetap menarik karena operasi perdamaian ini masih berlanjut dan memerlukan evaluasi berkelanjutan. Antara 2006 hingga 2023, perbatasan Lebanon-Israel relatif tenang meski terdapat pelanggaran udara oleh Israel dan serangan sporadis dari Lebanon. Namun, situasi berubah drastis pada Oktober 2023 dengan meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah. Anthony Elghossain mengingatkan bahwa meskipun kedua belah pihak tampaknya enggan terlibat dalam konflik bersenjata yang berkepanjangan, risiko eskalasi tetap ada.

Penelitian ini akan fokus pada efektivitas UNIFIL dalam meredam konflik Lebanon- Israel dengan menggunakan indikator kesuksesan operasi perdamaian sebagai acuan. Ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang belum mengkaji indikator tersebut secara mendalam. Olehkarena itu peneliti tertarik untuk menganalisis **“Bagaimana efektivitas peran UNIFIL sebagai operasi perdamaian PBB dalam meredam Konflik Lebanon-Israel?”** Peneliti bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas UNIFIL dalam mengelola dan meredam konflik di perbatasan Lebanon-Israel, serta menganalisis sejauh mana operasi ini memenuhi indikator kesuksesan yang relevan.

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian terdahulu seperti Mateja Peter dalam *“NUPI: Measuring the Success of Peace Operations”* membahas indikator kesuksesan operasi perdamaian melalui studi kasus dan data kuantitatif, menawarkan kerangka kerja untuk menilai efektivitas dengan perspektif dari akademisi seperti Thomas G. Weiss dan Virginia Page Fortna. (Peter, 2016) Ray Murphy dalam *“The Political and Diplomatic Background to the Establishment of UNIFIL”* menguraikan latar belakang politik dan tantangan pembentukan UNIFIL, serta peran penting AS dalam memengaruhi efektivitas misi. (Murphy, 2002) Karim Makdisi, Timur Göksel, Hans Bastian Hauck, dan Stuart Reigeluth dalam *“Emerging and Evolving European Engagement in Lebanon and the Middle East”* menganalisis kontribusi negara-negara Eropa dan peran UNIFIL dalam konflik Lebanon-Israel, menyoroti kompleksitas operasi perdamaian dan dampak keterlibatan negara-negara sekitar. (Makdisi, 2009) Penelitian ini menggunakan perspektif Neorealis dan teori Konsep Keberhasilan Operasi Perdamaian untuk mengevaluasi apakah mandat operasi tercapai, apakah operasi berkontribusi pada penyelesaian sengketa, dan apakah kehadiran operasi mendukung pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Metode penelitian yang

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan teknik analisis seperti reduksi data. Data diperoleh dari sumber literatur terpercaya, wawancara, dan observasi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang peristiwa yang terjadi.

PEMBAHASAN

Keterlibatan Hizbullah dalam Konflik Israel-Palestina

Hizbullah terlibat dalam konflik Israel-Palestina terutama melalui dukungannya terhadap berbagai kelompok militan Palestina dan penentangannya terhadap Israel. Keterlibatan Hizbullah dalam konflik Israel-Palestina terwujud beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan terhadap Kelompok Militan Palestina Hizbullah telah memberikan dukungan politik, keuangan, dan militer kepada berbagai kelompok militan Palestina dalam perjuangan melawan Israel. Dukungan ini mencakup pelatihan, persenjataan, dan bantuan logistik. Salah satu kelompok militan Palestina yang mendapat dukungan Hizbullah, adalah Hamas.
2. Serangan Raket Hizbullah memfasilitasi pengiriman roket dan persenjataan lainnya ke kelompok Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Kelompok-kelompok ini telah menggunakan roket-roket ini untuk melancarkan serangan ke wilayah Israel, terutama menargetkan kota-kota di Israel selatan.
3. Dukungan Ideologis dan Moral Hizbullah memainkan peran dalam mempromosikan perjuangan Palestina dalam bidang ideologi dan moral. Mereka telah menggambarkan diri mereka sebagai pembela hak-hak Palestina dan penentang keras kebijakan Israel, dan retorikanya telah diterima oleh banyak warga Palestina dan pendukung perjuangan Palestina.
4. Paham Anti-Israel Para pemimpin Hizbullah, khususnya Sekretaris Jenderal Hassan Nasrallah, sangat vokal dalam menentang Israel. Nasrallah telah berpidato dan mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan dan kebijakan Israel di wilayah tersebut. Pernyataan-pernyataan ini sering kali bergema di kalangan dunia Arab dan Muslim.

5. Eskalasi Militer Sayap militer Hizbullah, dengan persenjataan roket dan kemampuan militernya yang luas, telah menjadi alat pencegah yang signifikan terhadap tindakan Israel di Lebanon. Di masa lalu, konflik telah terjadi antara Israel dan Hizbullah, yang menyebabkan terjadinya baku tembak militer yang signifikan. Kemampuan Hizbullah dan kesediaannya untuk menghadapi Israel, menjadikannya salah satu faktor dalam perhitungan strategis Israel di kawasan Timur Tengah.
6. Aliansi Regional Keberpihakan Hizbullah dengan Iran yang menentang keberadaan Israel semakin memperkuat keterlibatannya dalam konflik Israel-Palestina. Iran memberikan dukungan finansial dan militer kepada Hizbullah dan telah mendorong perannya dalam mendukung militan Palestina. Penting untuk dicatat bahwa keterlibatan Hizbullah dalam konflik Israel-Palestina semata-mata karena kelompok ini memandang operasi yang dilancarkan Israel kepada Palestina, adalah bentuk agresi. Selain itu, keterlibatan Hizbullah juga didasarkan atas komitmennya dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Dukungan terhadap militan Palestina adalah salah satu aspek dari aktivitasnya, di samping perannya dalam politik Lebanon dan ambisi regionalnya, yang sering kali dilakukan melalui koordinasi dengan sekutu Iran. Keterlibatan Hizbullah dalam konflik Israel-Palestina telah berkontribusi terhadap ketegangan dan ketidakstabilan regional serta menjadikannya pemain penting dalam lanskap geopolitik Timur Tengah yang lebih luas.

Sistem perekonomian Lebanon adalah liberal dan terbuka. Pada tahun 2019, Lebanon dilanda kekacauan politik akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, berdasarkan data bank dunia pada akhir tahun 2019 menyebutkan lebih dari seperempat penduduk Lebanon hidup di bawah garis kemiskinan dan merupakan negara paling tinggi tingkat hutangnya di dunia dengan defisit sekitar US\$86 miliar. Pemerintah Lebanon gagal melaksanakan kewajiban, pembayaran Eurobond yang jatuh tempo pada tanggal 9 Maret 2020 guna mengamankan kebutuhan dasar rakyat dan kebutuhan lainnya. Pandemi Covid-19 di Lebanon, memperburuk situasi dan memaksa Pemerintah memberlakukan lock down, dengan menutup Bandara Internasional Rafiq Hariri dan akses keluar masuk Lebanon melalui darat, laut dan udara, serta penetapan “State Of Emergency” yang diumumkan Pemerintah pada 15 Maret 2020 dalam upaya penekan pandemic Covid-19.

Pemerintah kembali membuka Bandara RHIA pada 1 Juli 2020 serta kebijakan lain dalam rangka menggerakkan perekonomian, guna memperbaiki situasi dan kondisi perekonomian yang semakin terpuruk. Pada tanggal 04 Agustus 2020, terjadi insiden ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut yang telah memperburuk krisis ekonomi dan lonjakan kasus Covid-19. Dewan Pertahanan Tinggi Lebanon memutuskan untuk penerapan kembali lock down. Ekonomi Lebanon di awal tahun 2021 semakin terpuruk, karena peningkatan kasus Covid-19 pasca liburan dan keputusan Dewan Menteri dengan pemberlakuan lock down hingga 08 Februari 2021 dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 yang masih tinggi dengan kasus mencapai 6.200 kasus/hari.

Terbentuknya Resolusi dan UNIFIL

Lebanon secara geografis berada diantara 33O-35O LU dan 35O-37O BT, berbatasan dengan Suriah di sebelah timur dan utara, sebelah Barat menghadap ke laut tengah (Mediterranean Sea) dan Siprus, serta sebelah Selatan dengan Israel. Kondisi wilayah secara umum berbentuk pegunungan dengan luas wilayah 1.452 km, panjang pesisir pantainya sekitar 212 km dan terbagi atas 6 wilayah/provinsi yang sebagian besar merupakan daerah perkotaan meliputi Beirut, Mount Lebanon, North Lebanon, South Lebanon Sidon, South Lebanon Nabatieh dan Bekaa. Ibu kota Lebanon adalah Beirut yang terletak di pinggir laut. (Data, 2019) Lebanon sebagai negara multi culture dikawasan Timur Tengah, hampir sebagian besar penduduknya merupakan perpaduan keturunan Arab dan Eropa (khususnya Perancis). Data statistik jumlah penduduk tahun 2017 adalah 6.082 juta jiwa, di Beirut mayoritas warganya beragama Kristen Maronite, sedikit Muslim Sunni dengan variasi Greek Catholics dan Muslim Syiah yang cukup banyak di pinggiran selatan Beirut. Penduduk Beirut, selain Funisia (keturunan asli Lebanon) juga dipenuhi oleh keturunan Armenia. Warga Asia cukup sedikit terutama dari India, Bangladesh dan Srilanka.

Terbentuknya Resolusi dan UNIFIL Konflik antara Israel dan Hizbullah tahun 2006 berlangsung selama 34 hari. Pada 11 Agustus 2006, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1701 yang menyerukan diakhirinya serangan antara Israel dan Hizbullah. Penjelasan dari resolusi tersebut adalah peran pemerintah Lebanon untuk memberikan jaminan keamanan di perbatasan dan memantau lebih dekat pos-pos di perlintasan perbatasan di seluruh wilayah Lebanon. Resolusi tersebut sepenuhnya

bertujuan mengakhiri untuk permusuhan antara Israel dan Hizbullah, dan 15.000 penjaga perdamaian akan menggantikan posisi Israel di Lebanon selatan. (Farid Gaban, Surya Kusuma, 2006)

UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978 berdasarkan Resolusi 425 dan 426, dengan tujuan memastikan penarikan Israel dari Lebanon, memulihkan perdamaian, dan membantu pemerintah Lebanon memulihkan otoritasnya. Pasukan UNIFIL pertama ditempatkan pada 23 Maret 1978, sebagian besar berasal dari pasukan penjaga perdamaian PBB lainnya. Konflik di Lebanon pada 1982 dan 2006 menunjukkan peran penting UNIFIL dalam menjaga perdamaian. Setelah perang 2006, PBB memperluas mandat UNIFIL untuk memantau penghentian permusuhan, mendukung angkatan bersenjata Lebanon, dan memastikan akses kemanusiaan yang aman.

Indonesia telah berkontribusi sejak 2006 dengan mengirim Kontingen Garuda, dan saat ini menjadi negara kontributor militer terbesar untuk UNIFIL, dengan 1.309 personel. Kontribusi Indonesia didasari oleh komitmen menjaga perdamaian global dan solidaritas budaya dengan Lebanon. Resolusi PBB juga menyerukan penghentian operasi militer Israel dan Hizbullah, serta penguatan pasukan penjaga perdamaian di Lebanon selatan. Setelah perjanjian gencatan senjata, status quo dipulihkan sesuai perbatasan yang berlaku sebelum perang, dengan PBB menjalankan operasi penjaga perdamaian. (*Dinamika Konflik Lebanon*, n.d.)

Peacekeeping PBB adalah instrumen dinamis yang membantu negara-negara yang dilanda konflik menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi. Pasukan ini dikerahkan di wilayah dengan status gencatan senjata dan disetujui oleh pihak-pihak yang berkonflik. Mereka memantau dan membantu implementasi perjanjian damai di daerah pasca-konflik. Operasi penjaga perdamaian PBB melibatkan personel internasional dan otoritas setempat untuk mengelola konflik internasional maupun internal. Keberadaan pasukan UNIFIL di Lebanon dimulai sejak 1978 untuk mengatasi konflik, dengan Prancis sebagai salah satu negara yang mengirimkan pasukan pertama. Jerman dan Belanda mendukung keamanan laut, sementara AS membantu logistik. Implementasi Resolusi PBB 1701 dilakukan dalam 7 tahap, meliputi pemantauan gencatan senjata, membantu penggelaran pasukan Lebanon, mendukung penarikan pasukan Israel,

memberikan bantuan kemanusiaan, dan menjaga keamanan di wilayah perbatasan Lebanon-Israel.

Setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi, Israel mengadakan rapat kabinet darurat dan meratifikasi gencatan senjata pada 14 Agustus 2006. Indonesia kemudian mengirimkan pasukan KONGA XXVIII untuk bergabung dengan UNIFIL di Lebanon selatan. Meski UNIFIL sudah hadir sejak 1978, konflik tetap berlanjut dengan serangan sporadis antara Israel dan Hizbullah, meski tanpa korban jiwa. Hizbullah, dengan kekuatan militer lebih unggul dari UNIFIL, tetap menolak serangan Israel. Resolusi PBB belum sepenuhnya mengakhiri konflik, sehingga kehadiran UNIFIL masih diperlukan untuk menjaga perdamaian dan membantu tentara Lebanon (LAF) mengamankan wilayahnya.

Peran UNIFIL Dalam Penyelesaian Konflik Hizbullah-Israel

Menurut Johan Galtung, terdapat tiga pendekatan untuk mencapai perdamaian: *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. *Peacekeeping* menjaga keseimbangan kekuasaan untuk mencegah kekerasan, *peacemaking* fokus pada dialog dan negosiasi, sementara *peacebuilding* mengatasi akar penyebab konflik untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan. Menurut PBB, *peacekeeping* adalah instrumen untuk perdamaian dan keamanan yang didasarkan pada persetujuan pihak yang bertikai, netralitas, dan penggunaan kekuatan hanya untuk pertahanan diri.

UNIFIL, yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 425 dan 426 pada 1978, bertugas mengawasi gencatan senjata antara Israel dan Lebanon serta membantu Pemerintah Lebanon.

Setelah konflik 2006, Resolusi 1701 menugaskan UNIFIL untuk memantau penghentian permusuhan, mendukung Angkatan Bersenjata Lebanon, dan memastikan bantuan kemanusiaan. Keberhasilan UNIFIL memerlukan kerja sama Israel, Lebanon, dan Hizbullah dalam mematuhi resolusi. Pasca-Resolusi 1701, meski gencatan senjata berjalan, pelanggaran masih terjadi, seperti serangan roket dari Lebanon dan pelanggaran udara oleh Israel. UNIFIL terus memantau dan melaporkan insiden ini untuk menjaga stabilitas di sepanjang Garis Biru.

Menciptakan Zona Aman

Mandat UNIFIL mencakup dukungan kepada Angkatan Bersenjata Lebanon (LAF) untuk memastikan wilayah antara Garis Biru dan Sungai Litani bebas dari senjata selain milik LAF dan UNIFIL. UNIFIL bekerja sama dengan LAF melalui patroli bersama dan pelatihan, serta menciptakan zona aman di perbatasan Israel-Lebanon, terutama di sekitar Sungai Litani. Patroli dan pos-pos pengawasan didirikan di berbagai lokasi strategis dengan bantuan kontingen Ghana.

UNIFIL juga memusnahkan persenjataan berbahaya, termasuk ranjau dan alat peledak. Sejauh ini, sekitar 28 persen dari 40 juta meter persegi telah dibersihkan, dengan 150.000 alat peledak disterilkan. UNIFIL berusaha mencegah penyelundupan senjata ilegal, terutama di perbatasan Suriah-Lebanon, meskipun Israel sering melanggar wilayah udara Lebanon dengan dalih bahwa Hizbullah belum menyerahkan seluruh persenjataannya.

Perlindungan Terhadap Operasi Kemanusiaan

Konflik antara Lebanon dan Israel menyebabkan korban jiwa, terutama di Lebanon Selatan dan Israel Utara, dengan sebagian besar korban adalah warga sipil. Wilayah seperti Tyre, Beirut, Haifa, dan Galilee menjadi target utama. Bantuan kemanusiaan sangat dibutuhkan selama dan setelah perang, terutama di sektor medis. Kontingen UNIFIL, seperti dari India dan Indonesia, berperan aktif dalam upaya ini. Kontingen India menyediakan kaki palsu untuk korban ranjau dan mendirikan klinik "Jaipur Foot", sementara Kontingen Indonesia membantu anak-anak dan remaja dengan pelatihan, serta mendukung warga dewasa dengan pengobatan massal dan bantuan tenaga kerja. LESMANA 2019

UNIFIL juga membersihkan ribuan meter jalan, mendistribusikan lebih dari 1,7 juta liter air bersih, serta menyediakan layanan kesehatan untuk lebih dari 3.000 warga di Lebanon Selatan, yang meningkatkan dukungan masyarakat lokal terhadap keberadaan UNIFIL.

Analisis Efektivitas UNIFIL dalam Pengelolaan konflik Israel-Hizbullah

Konflik antara Israel dan Hizbullah yang meletus pada Oktober 2023 berakar dari ketegangan yang dipicu oleh perang Israel dengan Hamas. Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, memperingatkan Israel untuk melakukan gencatan senjata di Gaza,

yang disambut dengan ancaman dari Israel. Serangan udara dan rudal dari kedua pihak memuncak, dengan lebih dari 4.400 serangan dilaporkan hingga Juni 2024. Serangan ini mengakibatkan sekitar 100.000 warga sipil Lebanon mengungsi, 435 orang tewas, termasuk 349 tentara Hizbullah.

Wilayah selatan Lebanon dan Lembah Bekaa terkena dampak besar, sementara di Israel, 18 tentara dan 10 warga sipil juga menjadi korban. Pengungsian massal di kedua belah pihak terus berlanjut, terutama warga Lebanon dan Israel yang terdampak langsung oleh serangan udara.

Hizbullah, didukung oleh Iran, berkembang selama invasi Israel ke Lebanon pada 1982. Mereka memiliki sayap militer dan politik yang kuat dan telah menjadi kekuatan dominan di Lebanon. Konflik ini berpotensi memperluas ketegangan di Timur Tengah, terutama mengingat keterkaitan Lebanon dengan negara-negara seperti Suriah, Irak, dan Iran.

Mekanisme Pengiriman Pasukan Perdamaian

Pasukan perdamaian Indonesia dalam misi UNIFIL terdiri dari Milstaf dan Kontingen. Milstaf harus mendaftar dan menjalani tes, sementara Kontingen ditunjuk oleh komando atas. Pasukan Indonesia yang tergabung disebut Kontingen Garuda dan menjalani pelatihan PDT selama satu bulan di PMPP TNI. Saat tiba di UNIFIL, mereka melakukan latihan bersama dan patroli. Total personel yang dikirimkan mencapai 1.300, dengan rotasi tahunan. Pasukan perdamaian bertugas selama 6 bulan di lapangan dan digaji oleh PBB, serta mendapatkan penghargaan dan pengalaman kerja.

Tugas Pasukan Garuda Indonesia

Tugas UNIFIL/MTF berdasarkan UNSCR 1701 dalam CTF 448 terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, tugas pokok mencakup pelaksanaan operasi intersepsi maritim (MIO) untuk mencegah masuknya senjata dan material ilegal ke Lebanon melalui laut. Ini melibatkan pengawasan maritim di wilayah operasi, hailing terhadap kapal niaga, boarding kapal atas permintaan LAF-N, serta pelatihan personel LAF-N untuk meningkatkan kemampuan pengamanan maritim secara mandiri. Kedua, tugas tambahan termasuk penyediaan gambaran taktis udara, operasi pencarian dan penyelamatan (SAR), serta pengamanan maritim saat Tripartite Meeting. Ketiga, tugas terkandung meliputi

latihan internal antar unsur MTF untuk menjaga kesiapan operasional sesuai jadwal latihan mingguan.

Kondisi dan Kawasan yang Diawasi

Garis perbatasan laut yang diawasi ialah perbatasan laut Lebanon dan Israel tetapi adanya Line of Buoy (LoB) merupakan batas DAS yang ditentukan secara sepihak oleh Israel. Dalam ketentuan UNCLOS 1982, garis tersebut berada dalam wilayah Lebanon. LoB ditarik 290 derajat oleh Israel dari yang seharusnya 270 derajat dan dijadikan garis demarkasi. IDF melarang nelayan atau kapal dari Lebanon melintasi Line of Buoy. Area of Maritime Operation (AMO). AMO adalah area operasi unsur MTF dalam melaksanakan tugas pokok sesuai mandat. AMO dibagi atas 4 zona yang terdiri dari:

1. Zone 1, merupakan perairan internasional dimana unsur memiliki mandat dari UN untuk melaksanakan hailing terhadap kapal-kapal yang akan Inbound, Outbound Lebanon maupun yang hanya melintasi (transit) di AMO. Zone 1 dibagi menjadi 3 bagian yaitu Zone 1 South, Zone 1 Center dan Zone 1 North.
2. Zone 2, merupakan zona khusus dan rawan dimana masih terdapat permasalahan perbatasan laut antara pihak Lebanon dengan Israel yang mengklaim secara unilateral ekstensi wilayah teritorialnya menggunakan LoB (Line of Buoy), dimana unsur MTF menganggap are tersebut sebagai zona abu-abu dimana unsur MTF harus menghindar sejauh 500 Yard dari zona tersebut, terkecuali atas perintah dan hal khusus (tripartite meeting)
3. Zone 3, merupakan perairan teritorial Lebanon bagian luar ($\pm 6 - 12$ Nm dari garis pantai) dimana unsur-unsur MTF masih dapat melaksanakan tugas utamanya Maritime Interdiction Operation, sebelum ditidakanjuti oleh LAF-N.
4. Zone 4: merupakan perairan teritorial Lebanon bagian dalam ($\pm 0 - 6$ Nm dari garis pantai) dimana unsur-unsur MTF sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai MIO, selanjutnya tugas tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh LAF-N.

Selain 4 zone tersebut, MTF mengalokasikan 1 area lagi di luar AMO yang dapat digunakan oleh unsur-unsur khusus untuk melaksanakan latihan Penembakan/GUNEX yaitu Area Barbara 3.(UNIFIL, 2021)

Ada 3 pelabuhan yang diawasi ialah pelabuhan Tyr, pelabuhan Beirut dan pelabuhan Tripoli. Tetapi, yang menjadi hotspot nya memperhatikan kapal yang keluar masuk ke Beirut karena merupakan ibukota dan kapal dagang lebih banyak masuk ke Beirut. Blue Line (BL) adalah jalur penarikan Israel dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Garis ini sepanjang 121 km dan bukan merupakan garis perbatasan antara dua negara. Blue Line merupakan batas, ada batas berupa tembok terbentang yang sekarang terbangun sepanjang 13 km dan juga ada berupa blue barrel atau seperti tong biru. Maka dapat ditelaah tugas dan kontribusi pasukan perdamaian Indonesia dalam menjaga perdamaian diantara wilayah Lebanon-Israel.

Kontribusi Pasukan Perdamaian

Berdasarkan permintaan dari Pemerintah Lebanon di bawah mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 (UNSCR 1701) maka dibentuklah Maritime Task Force pada tanggal 15 Oktober 2006 yang mendukung Angkatan Laut Lebanon dalam hal pengawasan laut teritorial, mengamankan garis pantai dan mencegah masuknya senjata maupun barang-barang yang dilarang melalui laut. Pada kenyataannya MTF tidak hanya berhasil menjalankan tugas utama mereka, tetapi juga berhasil memberikan kenyamanan dalam perdagangan dan ekonomi bagi Lebanon khususnya dari laut. (UNIFIL, 2021)

Pasukan perdamaian Indonesia pertama kali dikirim ke UNIFIL pada tahun 2006 dan sejak 2009, Indonesia juga mengirimkan Angkatan Laut dalam Misi MTF. Peran pasukan Indonesia dalam MTF adalah menjaga batas laut antara Lebanon dan Israel, menggunakan satu unit Kapal Perang RI yang diganti setiap tahun. Konflik Hizbullah di Lebanon merupakan contoh PKO generasi pertama atau tradisional yang fokus pada pengawasan penarikan tentara Israel dan pemulihan otoritas pemerintah Lebanon, sesuai dengan Resolusi DK PBB Nomor 425 dan 426 Tahun 1978. Dengan keluarnya Resolusi 1701 Tahun 2006, peran pasukan perdamaian UNIFIL berkembang menjadi PKO generasi kedua yang melibatkan bantuan perdamaian dan tugas multidimensional, termasuk akses kemanusiaan dan kegiatan militer. Kontingen Garuda TNI telah berpartisipasi dalam misi perdamaian. PBB sejak 2006, termasuk di Kongo dan Lebanon. Tugas mereka dilandasi oleh nilai-nilai Indonesia seperti saling menghormati, ramah, dan gotong royong, yang membedakan mereka dari kontingen lain. Kelebihan ini membuat

mereka diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, berkat sikap sopan dan kepatuhan terhadap aturan PBB.

Pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon memainkan peran penting dalam bantuan kemanusiaan, termasuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat lokal serta memberikan dukungan psikologis dan kebutuhan penting. Pasukan Indonesia, termasuk TNI dan Kowad, terlibat dalam program Civil-Military Cooperation (CIMIC) untuk membantu perempuan dan anak-anak yang mengalami trauma akibat konflik. UNIFIL bekerja sama dengan masyarakat lokal, LSM, dan tokoh penting untuk membangun kepercayaan dan stabilitas. Kontingen Garuda Indonesia dikenal karena kemampuan mereka dalam hubungan sipil-militer, dengan fokus pada pemulihan pasca-konflik, seperti membangun kembali infrastruktur yang rusak dan memberikan pelayanan kesehatan.

UNIFIL juga menghadapi situasi yang semakin tegang, termasuk serangan roket dekat markas mereka di Lebanon. Pasukan Indonesia, yang merupakan bagian terbesar dari UNIFIL dengan sekitar 1.232 personel, melakukan latihan intensif untuk memastikan kesiapan menghadapi situasi darurat.

KESIMPULAN

Konflik antara Lebanon dan Israel memuncak pada 14 Juli 2006, ketika keduanya setuju untuk melakukan gencatan senjata di bawah Resolusi DK PBB 1701. Untuk menjaga perdamaian, PBB menginisiasi UNIFIL, dengan Maritime Task Force (MTF) bertanggung jawab atas area maritim. Indonesia berkomitmen aktif dalam misi ini, mengirimkan pasukan yang berhasil mencapai hasil "MEMUASKAN." Respon positif dari masyarakat Lebanon terhadap pasukan perdamaian, termasuk Indonesia, menjadi indikator keberhasilan misi. Kontribusi Indonesia memperkuat hubungan kerjasama dengan Lebanon dan mendatangkan manfaat dalam politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Data, L. (2019). *Laporan Purna Tugas Satgas MTF TNI Konga XXVIII-L. Dinamika Konflik Lebanon.* (n.d.).

- Farid Gaban, Surya Kusuma, and A. H. (2006). *Apa Dan Siapa Hizbullah & Nasrallah*.
- Jinsa. (2021). *How UNIFIL can still succeed in Lebanon? ?*”, <https://jinsa.org/how-unifil-can-still-succeed-in-lebanon/>
- Makdisi, K. et al. (2009). UNIFIL II: emerging and evolving European engagement in Lebanon and the Middle East. *UN in the Arab World*.
- Murphy, R. (2002). The Political and Diplomatic Background to the Establishment of UNIFIL in Lebanon and the UNITAF and UNOSOM Missions in Somalia. *Journal of Conflict Studies*, 22.2, 26–56.
- Peter, M. (2016). *Measuring the success of peace operations: Directions in academic literature*.
- Sousa, R. R. P. (2018). *The context of conflict resolution: international relations and the study of peace and conflict*.
- UN. (2021). *Peacekeeping*. <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unifil>
- UNIFIL, K. T. X. (2021). *Buku Panduan Satgas L*.